

SALINAN

WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 100-7.1/587/ Dinkes/2025 TENTANG

PEMBERIAN HIBAH KEPADA LEMBAGA KOMISI PENANGGULANGAN AIDS TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA PALU,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan penyelenggaraan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah memberikan bantuan dalam bentuk hibah kepada Lembaga yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Wali Kota menetapkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah yang akan dihibahkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Hibah Kepada Lembaga Komisi Penanggulangan Aids Tahun Anggran 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
- 7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
- 8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9);
- 9. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 44 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Palu Nomor 44 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN HIBAH KEPADA LEMBAGA KOMISI PENANGGULANGAN AIDS TAHUN ANGGARAN 2025. **KESATU**

: Pemberian hibah diberikan kepada Lembaga Komisi Penanggulangan Aids sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

KEDUA

: Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan proposal permohonan dan hasil penilaian Tim Verifikasi yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Kesehatan Kota Palu.

KEEMPAT

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu pada tanggal 21/04/2015

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum.

MUMAMMAD AFFAN NIP. 19780212 199803 1 004